

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Jurnal/Skripsi/Thesis

- Freeman, R. E. (2010). *Strategic management: A stakeholder approach*. Cambridge university press.
- Lattimore, D. Baskin. (2010). *Public Relations: Profesi dan Praktik* Ed. 3. Salemba Humanika. Jakarta
- Caroline G Hernandez, Governance, Civil Society, and Democracy, makalah Conference on Good Governance in East Asia Relaties, Problems, and Chalenges, Jakarta, 1999
- Jazim Hamidi, Penerapan Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Layak Di Lingkungan Peradilan Administrasi Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999
- Widodo, Joko, Good Governance; Telaah Dari Dimensi Akuntabilitas, Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi Dan Otonomi Daerah, Surabaya: Insan Cendekia, 2001.
- Poerwandari, Pendekatan Kualitatif untuk Penelitian Perilaku Manusia (2005)
- Poloma, M. M. (2013). *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo
- Abdullah, Kasman, "Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Konsep *Good Governance*" *Jurnal Meritokrasi* Vol. 1 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2002.
- Alam H. 2017. *Kerja Sama Pemerintah Daerah dan PT. Lonsum dalam Pemeberdayaan Masyarakat Petani Karet di Kecamatan Bulukumba Kabupaten Bulukumba*. Skripsi. Tidak diterbitkan. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Muhammadiyah Makassar: Makassar.
- Amiruddin. (2014). "Penyelesaian Sengketa Tanah Hak Ulayat Masyarakat Suku Kajang dengan PT. PP London Sumatera Indonesia di Kabupaten Bulukumba." *PETITUM* 1.1 April (2014): 93-94.
- Arisaputra, Muhammad Ilham. "Penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* dalam penyelenggaraan reforma agraria di Indonesia." *Yuridika* 28.2 (2013).

- Covey, Stephen. 2004. *The 7 Habbits Of Highly Effective People (Cetakan ke-15)*. Jakarta: Binarupa Aksara. Hal. 259.
- Fauzi, N. (2008). Gelombang Baru Reforma Agraria Di Awal Abad Ke-21. *Universitas Indonesia, Depok*.
- Friedman, R.E. 1984. *Strategic Management : A Stakeholders Approach*. Fitman : Boston.
- Laboratorium Jurusan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Haluleo.2013.Etnoreflika. *Sosial Budaya*, 2(1), 155-156.
- Lattimore, D., Baskin, O., Heiman, S. T., & Toth, E. L. (2010). Public Relations profesi dan praktik. *Jakarta: Salemba Humanika*.
- Mahrudin, M. (2010). Konflik Kebijakan Pertambangan Antara Pemerintah dan Masyarakat di Kabupaten Buton. *Jurnal Studi Pemerintahan*, 1(1).
- Maladi, Y. (2012). Dominasi Negara Sebagai Sumber Konflik Agraria di Indonesia. *MASALAH - MASALAH HUKUM*, 41 (3).
- Moekijat. Koordinasi: Suatu Teoritis, Bandung: Mandar Maju. 1994.
- Mongabay.(2013). "Konflik Lahan, 3.500 Petani Bulukumba Duduki Perkebunan Lonsum". Diakses Pada 16 Februari 2022 pukul 15.55 melalui www.mongabay.co.id
- Mongabay.(2018). "Warga Kajang Hadang Alat Berat PT. Lonsum Di Bulukumba Ada Apa?". Diakses Pada 16 Februari pukul 19. 21 melalui www.mongabay.co.id
- Nugroho, Hermawan Cahyo; Soesilo Zauhar; dan Suryadi. (2014) Koordinasi Pelaksanaan Program Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kabupaten Nganjuk. *Jurnal J-PAL*, 5(1) : 12-22.
- Prasetyo,Priyo Katon dkk. (2020). *Praktik Kebijakan Program Strategis Nasional, Kendala dan Peluang*. Yogyakarta: STPN Press.
- Poerwandari, Kristi, 2005. Pendekatan Kualitatif untuk Penelitian Perilaku Manusia. Jakarta : Fakultas Psikologi UI
- Raja, N. A. (2019). Analisis Peran Pemerintah Daerah dalam Penyelesaian Konflik Agraria (Studi Kasus Konflik Antara PT. PP. London Sumatra dengan Masyarakat di Kabupaten Bulukumba). 101-103 .

- Rusmadi Murad, "Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah" Bandung : Alumni, 1999. Hlm 22-23.
- Sofyandi dan Garniwa. 2007. *Perilaku Organisasional*. Edisi Pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sulviana, S. (2017). *Penyelesaian Sengketa Tanah Antara PT. PP. London Sumatera Indonesia Tbk dengan Masyarakat Kabupaten Bulukumba* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).
- Wakka, Kadir. Analisis *Stakeholders* Pengelolaan Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Penelitian Kehutanan Wallacea* Vol.3 No.1, April 2014 : 47-55

Media Cetak/Daring

- Kabupaten Bulukumba. (2018). "Lagi, Pemkab Mediasi Tuntutan Warga Kepada Pihak Lonsum". Diakses Pada 16 Februari 2022 Pukul 21.05 melalui www.bulukumbakab.go.id
- Konflik. Pada KBBI Daring. Diambil pada 13 Februari 2022 dari <https://kbbi.web.id/konflik>
- Kontras.(2003)."Amuk PT. Lonsum di Bulukumba". Diakses Pada Tanggal 15 Februari 2022 Pukul 13.20 Wita melalui www.kontras.org.
- KPA(2019). "Usir PT. Lonsum, Kembalikan Tanah Ulayat Masyarakat Adat Ammatoa Kajang Bulukumba". Diakses pada tanggal 11 Februari 2022 Pukul 23.16 Wita melalui kpa.or.id
- Pangannews.id, <https://pangannews.id/berita/1650414735/hindari-konflik-lahan-butuh-sinergitas-dan-perkuat-komitmen-bersama>, diakses pada 08 Maret 2023 pada 21:03 WITA.
- Mongabay.co.id , "Konflik Lahan, 3.500 Petani Bulukumba Duduki Perkebunan Lonsum". Diakses Pada 16 Februari 2022 pukul 15.55 WITA
- Mongabay.co.id , "Warga Kajang Hadang Alat Berat PT. Lonsum Di Bulukumba Ada Apa?". Diakses Pada 16 Februari pukul 19. WITA

Bulukumbakab.go.id, “Lagi, Pemkab Mediasi Tuntutan Warga Kepada Pihak Lonsum”. Diakses Pada 16 Februari 2022 Pukul 21.05 WITA

Peraturan – Peraturan

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan Dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Dan Kantor Pertanahan

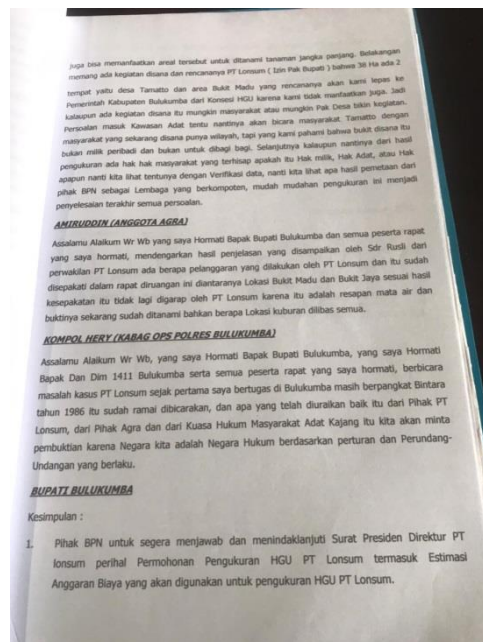
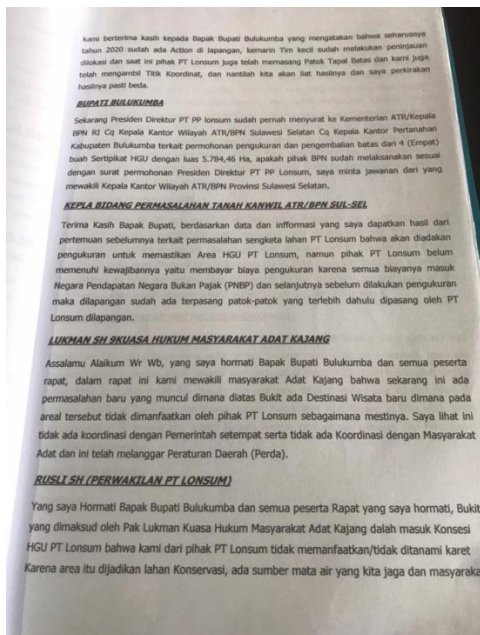
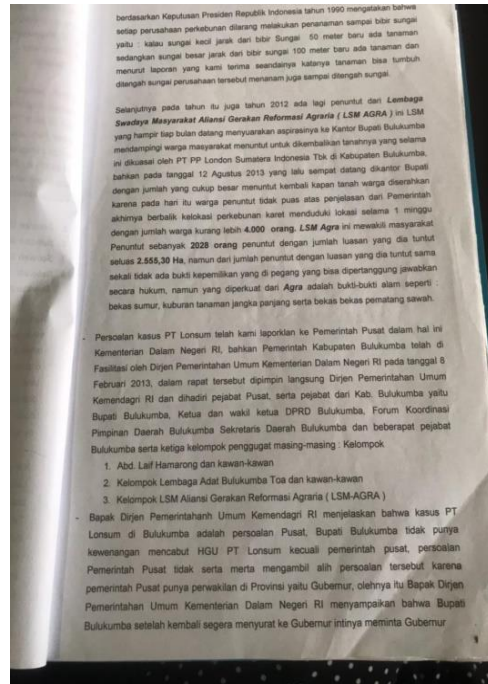
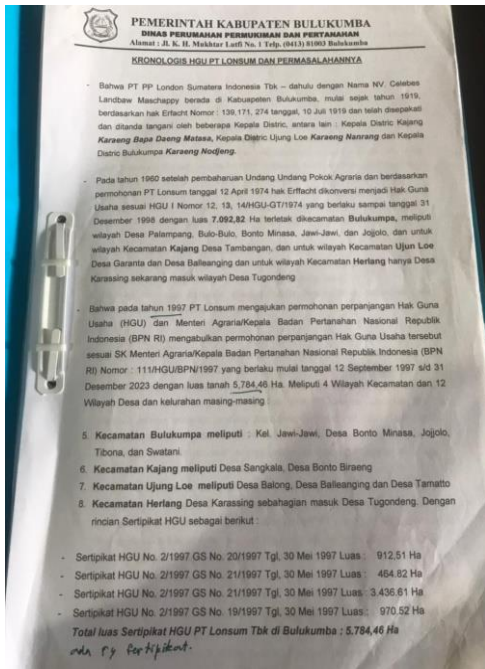
Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengukuhan, Pengakuan Hak dan Perlindungan MHA

Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

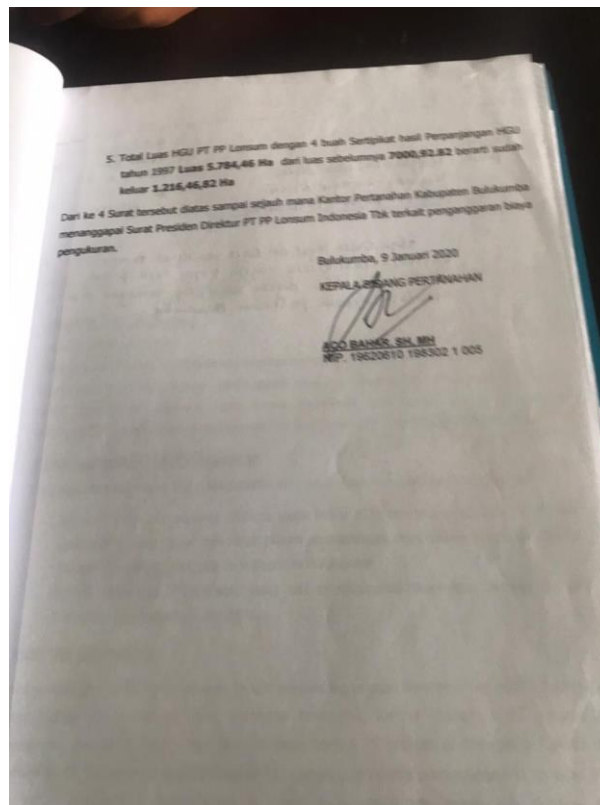
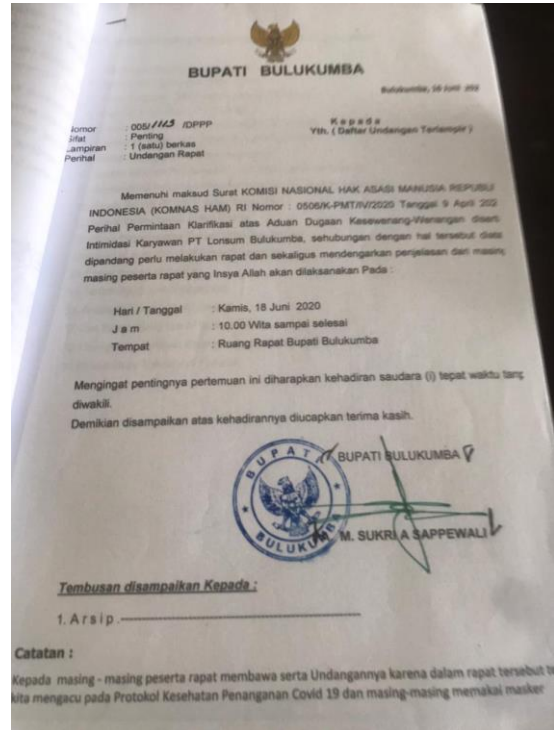
LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 DATA SEKUNDER

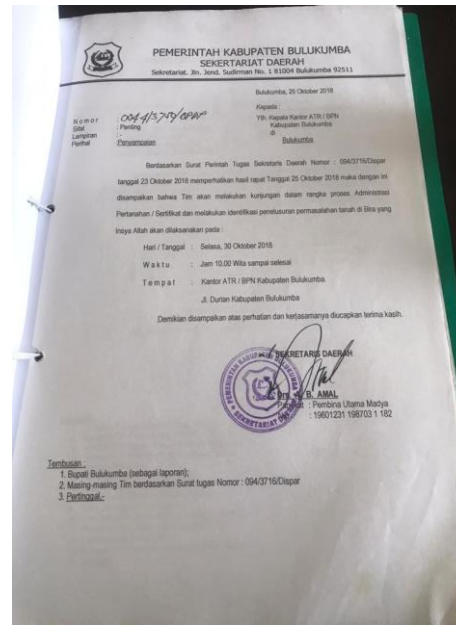
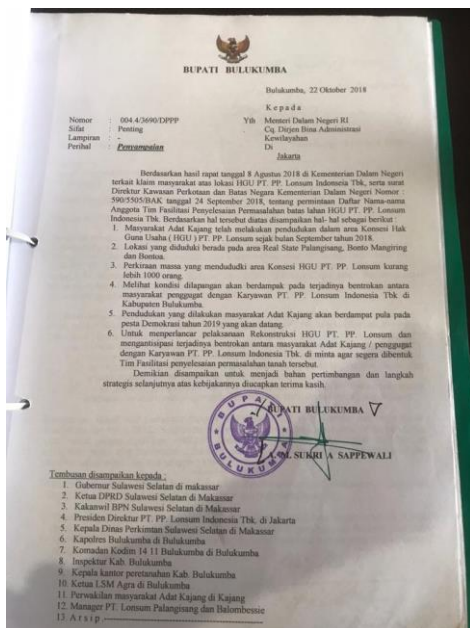
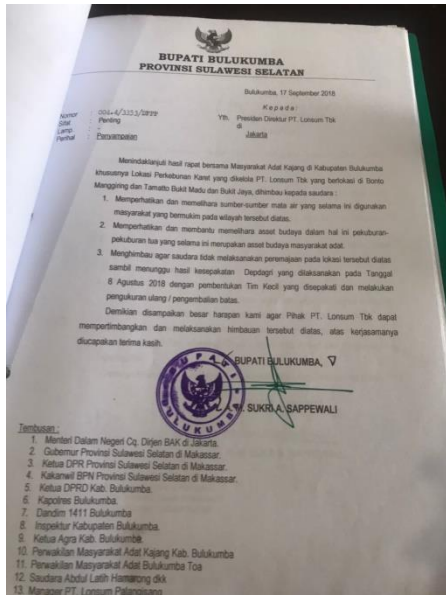
Kronologi Konflik PT. PP. London Sumatra Indonesia Tbk dan Permasalahannya



Undangan Rapat penyelesaian sengketa tanah



LAMPIRAN DOKUMEN KOORDINASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA



LAMPIRAN 2 DOKUMENTASI DAN WAWANCARA



Wawancara dengan Bapak Rusli (Humas Lonsum)



Wawancara dengan Bapak Ahmad Saparuddin (Kepala Survey dan Pemetaan Kantor Pertanahan ATR BPN Bulukumba)



Wawancara dengan Rudi Tahas (Ketua AGRA Bulukumba)



Lokasi perbatasan *Rembang Ilalang* dan *Rembang Luara* (Proses menuju wawancara di wilayah pedalaman/*Rembang Ilalang* Ammatoa Kajang)

SURAT KETERANGAN PENELITIAN



PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
Alamat : Jl. Kenari No.13 Telp. (0413) 85060 Bulukumba 92512

Bulukumba, 30 Mei 2022

Nomor : 302/DPMPTSPTK/V/2022
Lampiran :
Perihal : Izin Penelitian

Kepada
Yth. Nama Tertampir

Masing – Masing
Di
Tempat

Berdasarkan Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor : 074/373/Kesbangpol/V/2022 tanggal 27 Mei 2022 Perihal Rekomendasi Izin Penelitian maka yang tersebut dibawah ini :

Nama : **NURFASILA**
Nomor Pokok : **E051181018**
Program Studi : **ILMU PEMERINTAHAN**
Institusi : **UNHAS MAKASSAR**
Alamat : **JL. SEJATI UNHAS MAKASSAR**

Bermaksud melakukan Penelitian di Nama Tertampir Kabupaten Bulukumba dalam rangka **SKRIPSI** dengan judul "**HUBUNGAN STAKEHOLDER DALAM PENYELESAIAN KONFLIK AGRARIA DI KABUPATEN BULUKUMBA**" yang akan berlangsung pada tanggal 10 Mei s/d 25 Juni 2022.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami mengizinkan yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan tersebut dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mematuhi semua Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku dan mengindahkan adat - istiadat yang berlaku pada masyarakat setempat;
2. Tidak mengganggu keamanan/ketertiban masyarakat setempat;
3. Penelitian/pengambilan data menyimpang dari izin yang diberikan;
4. Melaporkan hasil pelaksanaan penelitian/pengambilan data serta menyerahkan 1(satu) eksampul hasilnya kepada Bupati Bulukumba Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bulukumba;
5. Surat izin ini akan dicabut atau dianggap tidak berlaku apabila yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut di atas, atau sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan kegiatan penelitian/pengumpulan data dimaksud belum selesai.

Demikian surat izin ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



FERRYWAN Z. FAHMI, S.STP., M. AP

Pangkat : Pembina Tk.I
NIP : 19820212 200212 1 001

Tembusan:

1. Bupati Bulukumba di Bulukumba (sebagai laporan);
2. Kepala Badan Kesbangpol Kab. Bulukumba di Bulukumba;
3. Arsip.



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BULUKUMBA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Jalan Durian Nomor 9 BulukumbaTelp. 81265 email bpnbulukumba@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 1626/SKet-73.02.UP.02.03/VI/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bulukumba menerangkan bahwa :

Nama : NURFASILA
NIM : E051181018
Universitas : UNHAS MAKASSAR
Program Studi : ILMU PEMERINTAHAN
Judul Penelitian : HUBUNGAN STAKEHOLDER DALAM PENYELESAIAN KONFLIK AGRARIA DI KABUPATEN BULUKUMBA.

Benar telah melaksanakan Penelitian di Kantor Pertanahan Kabupaten Bulukumba pada tanggal 30 Mei s/d 10 Juni 2022.

Surat Keterangan Penelitian ini diberikan Berdasarkan surat Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Nomor : 302/DPMPTSPTK/V/2022 tanggal 30 Mei 2022 perihal Izin Penelitian.

Demikian surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bulukumba, 10 Juni 2022

a.n. KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN BULUKUMBA
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA

Ditandatangani secara elektronik

Hj. ASLINDA AMSAK, S.E., M.M.
NIP. 19750512 200804 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Jl. K.H. Muchtar Lutfi No. 1 Telp. (0413) 81003 Bulukumba

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 226 / DPKPP/VI/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan
Pertanahan Kabupaten Bulukumba menerangkan bahwa :

Nama : NURFASILA
NIM : E051181018
Universitas : UNIVERSITAS HASANUDDIN
Program Studi : ILMU PEMERINTAHAN
Judul Penelitian : HUBUNGAN STAKEHOLDER DALAM PENYELESAIAN
KONFLIK AGRARIA DI KABUPATEN BULUKUMBA.

Benar telah melaksanakan Penelitian di Kantor Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan
Pertanahan pada tanggal 10 Mei s/d 10 Juni 2022.

Surat Keterangan Penelitian ini diberikan Berdasarkan surat Kepala Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Nomor : 302/DPMPTSPTK/V/2022 perihal Izin
Penelitian.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bulukumba, 10 Juni 2022
KEPALA DINAS,



DJUNADI ABDILLAH, SE, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 19621231 199403 1 076